

INSPIRASI DAN PELUANG AGRIBISNIS INDONESIA

AGRINA

Vol. 19 - No.356 - Februari 2024
www.agrina-online.com



5 PAKAR BICARA

APA SAJA YANG HARUS DILAKUKAN PRESIDEN BARU

**AGAR AGRIBISNIS INDONESIA
SEMAKIN MAJU**

Edisi Digital Tersedia di:
www.ebook.gramedia.com
www.magzter.com
www.mahoni.com
www.myedisi.com

LIPUTAN KHUSUS PADI Hlm 38
Pascapanen Padi & Closeloop

ISSN 0216-9789



Rp 30.000,-

ISEKI
BERSAMA LEBIH KUAT

4WD TRACTOR
T-97R

Performa yang luar biasa,
untuk segala medan



Dipromosikan oleh PT ISEKI INDONESIA



SORTER BENIH
**CROWN
TIGER**
KAWASHIMA
STS-600

Produksi **GABAH**
Meningkat Pesat dengan
BENIH PREMIUM

Creating the Future

SATAKE

Full-Color RGB, NIR & Shape Sorting

NIRAMI
Series



Mendorong Kebangkitan Poros Maritim

Infrastruktur rantai dingin dan efisiensi biaya logistik menjadi catatan produksi perikanan yang berdaya saing.

Presiden terpilih harus kembali membangkitkan poros maritim karena ke depan ekonomi kelautan mau tidak mau harus menjadi tumpuan ekonomi nasional. "Tentu harus dikelola secara baik. Jangan sampai memindahkan pendekatan-pendekatan eksploitatif di darat ke laut," tegas Dr. Suhana, S.Pi., M.Si., pengamat ekonomi kelautan dan perikanan di Jakarta (5/2).

Ekonomi Perikanan Fluktuatif

Menurut Suhana, pertumbuhan ekonomi perikanan dalam empat tahun terakhir cukup bergelolak. "Di kabinet kedua ini cenderung pemerintah tidak mampu menjaga stabilitas ekonomi perikanan. Pertumbuhan ekonomi perikanan di era kedua ini fluktuasinya sangat tajam sekali," katanya.

Produk Domestik Bruto (PDB) perikanan pada 2020 di bawah 1% saat pandemi Covid-19. Pada 2021 PDB naik menjadi 5,9% dan turun ke 2,54% pada 2022 dan naik lagi menjadi 5,49% pada 2023. Fluktuasi dipicu kebijakan yang berubah-ubah, seperti aturan ekspor benih lobster dan hadirnya kebijakan baru penangkapan ikan terukur (PIT).

Kondisi tersebut, ulasnya, berdampak terhadap penurunan investasi di sektor perikanan, khususnya investasi asing (PMA). Berturut-turut nilai PMA sebesar US\$48.250 juta di 2020, US\$17.106 juta di 2021, US\$31.620 juta dan US\$21.309 juta. Penurunan tertinggi PMA terjadi pada 2021, sebesar 61,51%. "Investasi perikanan turun karena investor akan melihat bagaimana kestabilan ekonomi perikanan. Sehingga, PR (pekerjaan rumah, Red.) dari Menteri Kelautan dan Perikanan yang akan datang adalah di tahun-tahun pertama ini bagaimana bisa menjaga stabilitas ekonomi perikanan. Itu untuk mengembalikan kepercayaan publik bahwa perikanan ini betul-betul dibawa kepada kebijakan yang *on the track* lagi," sarannya.

Menurut Dekan Fakultas Sains dan Teknologi,

Universitas Teknologi Muhammadiyah Jakarta itu, jika pemerintah konsisten menjalankan kebijakannya, pertumbuhan ekonomi perikanan bisa stabil menuju angka 6%-7% PDB nasional. Ia mencontohkan, periode sebelumnya pemerintah menerapkan moratorium kapal asing pada 2015. "Itu terjadi pertumbuhan ekonomi yang turun karena dipicu oleh penghentian kapal asing. Tapi hanya di 2015 saja, 2016 sampai 2019 (pertumbuhan ekonomi) itu stabil lagi," terangnya.

Di samping itu, Suhana berpandangan, kebijakan PIT juga tidak didukung oleh naskah akademik yang kuat. Kuota dalam PIT juga bisa dipindah-tangankan atau ditransfer ke pihak lain. "Dalam *individual transfer quota*, ketika saya mendapatkan kuota, akan memunculkan calo-calo perizinan, calo-calo kuota karena orang yang punya uang dengan leluasa akan punya kuota. Dan itu akan menumpuk di satu orang. Bisa seperti itu dan aturannya memungkinkan seperti itu," jelasnya.

Padahal, aturan ini bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 33 ayat (3). Pasal tersebut menyatakan, 'Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.' Hingga saat ini konsep *individual transfer quota* juga belum ada kajiannya di Indonesia. "Itu meniru konsep negara maju, Australia. Nelayan melaporkan secara mandiri dan itu sudah terjaga dengan baik. Itu tidak mudah kita membalikkan telapak tangan. Apalagi, bisa dipindah-tangankan," katanya.

Orientasi Pasar

Satu hal yang perlu mendapat perhatian pemerintah, ucap Suhana, implementasi analisis pasar. "Sampai saat ini lebih dari 60%-70% ekspor kita terfokus di Amerika. Udang, nila, itu semua terfokus di Amerika. Sehingga ketika Amerika bergejolak seperti saat ini, itu jadi rapuh. Akhirnya, pemerintah menggenjot produksi apapun tetapi ketika pasar kita hanya terkonsentrasi di Amerika itu menjadi rapuh. Jadi, menteri yang baru itu perlu meningkatkan penetrasi pasar. Karena kalau

China tidak bisa melakukan penetrasi pasar yang baik, akhirnya produk perikanan kita di pasar tidak berkembang, akan sangat tergantung sama Amerika, China, plus Jepang," terangnya.

Saat ini udang Indonesia tengah menghadapi tuduhan *antidumping* dari American Shrimp Processors Association (ASPA) yang dilayangkan pada Oktober 2023. Jika tuduhan itu terbukti, menurut Suhana, komoditas perikanan lainnya, seperti nila juga akan kena imbasnya. Di samping itu, udang yang terkena embargo akan akan masuk ke pasar lokal dengan harga murah dan mengganggu stabilitas komoditas lainnya.

Dalam menargetkan produksi udang 2 juta ton, Suhana mengamati, pemerintah juga tidak mengantisipasi pasar. Serapan pasar udang internasional sekitar 3,6 juta ton dalam bentuk olahan. "Pemerintah strategi pasarnya belum jelas dari 2 juta ton mau dilempar ke mana. Indonesia hanya mengeksport 232 ribu ton tahun 2022, stabil di 200 ribu ton. Kalau pasar hanya tergantung Amerika 'kan nggak mungkin. Bagaimana meyakinkan pasar, lobi-lobi pemerintah itu sangat berperan dalam menentukan pasar, termasuk tarif dan nontarif di negara tujuan," imbuhnya.

Suhana menyoroti strategi pasar yang harus diambil. "Apakah dengan yang selama ini sudah dilakukan misalnya promosi, konsistensi dalam mempromosikan, lalu menambah jumlah ekspor ke Uni Eropa yang sampai saat ini belum ada penambahan lagi. Ini memerlukan lobi-lobi politik perdagangan yang mumpuni," tukasnya.

Produksi Budidaya

Suhana juga menganalisis produksi perikanan budidaya sejak 1950 – 2020 yang mengalami perubahan jenis ikan. Pada 1950-2009 sebagian besar ikan yang diproduksi adalah bandeng. Memasuki 2010-2020, produksi terbesar beralih ke ikan nila. "Jadi, di 2020 itu hampir 22,43% produksi perikanan budidaya Indonesia adalah nila. Yang tadinya di atas 20% itu bandeng sampai tahun 2000-an. Artinya, era bandeng sudah selesai, digantikan komoditas lain. Sekarang nila lalu *catfish* (patin dan lele), setelah itu bandeng," ujarnya.

Karena itu, harus ada perubahan pola kebijakan pemerintah terkait penetapan barang kebutuhan pokok. Pada 2015 pemerintah menetapkan barang kebutuhan pokok, termasuk perikanan terdiri dari 5 jenis, yaitu tuna, tongkol, cakalang, kembung, dan bandeng. Mengingat pola produksi perikanan budidaya yang sudah berubah, menteri baru harus mendorong nila dan *catfish* menjadi

barang kebutuhan pokok.

"Ini gunanya supaya ketika pemerintah melakukan bansos, dia (nila dan *catfish*) akan masuk. Dan ini produksinya masif di masyarakat. Itu bisa dikemas ikan *fresh* (segar), tidak lagi olahan. Kalau ditetapkan pemerintah sebagai kebutuhan pokok, ini bisa jadi pegangan pemda untuk menetapkan nila dan *catfish* sebagai barang bantuan pemerintah. Sehingga, produksi nila dan *catfish* yang semakin besar dapat terserap



WINDI L

dengan baik di pasar nasional. Jangan sampai kita dorong produksi budidaya, pasarnya nggak ada," urainya.

Ketika pemerintah menambahkan nila dan *catfish* sebagai barang kebutuhan pokok, pembudidaya otomatis akan semangat meningkatkan produksi karena ada jaminan serapan pemerintah. "Ketika terjadi krisis, pembudidaya kita menjadi andalan," imbuh Suhana.

Dia juga menuturkan, hingga saat ini penggunaan perikanan dan kelautan belum memiliki rencana jangka panjang yang solid sehingga perlu dirumuskan dan berangkat dari kondisi saat ini. "Budidaya yang ramah lingkungan juga harus terus diorong karena ke depan isu ketersediaan pangan sangat tergantung pada budidaya.

SUHANA,
mendedepankan
pendekatan berke-
lanjutan di laut

Tapi isu jangka panjang yang akan disorot terkait keberlanjutan, tidak hanya lingkungan tapi keberlanjutan pakan. Pakan itu bahan bakunya apakah ikan rucah atau apa, itu ditelusuri. Pakan sumbernya dari mana, apakah hasil *IUU-Fishing (Illegal, Unreported, Unregulated Fishing)?*" terangnya.

Ketika mengembangkan budidaya, korelasinya sangat tinggi dengan aktivitas penangkapan ikan. Sebab, tepung ikan sebagian besar masih meng-



DEK KAP

SARANA rantai dingin harus diterapkan sejak awal ikan ditangkap sehingga mutunya terjaga

andalkan ikan hasil tangkapan. "Kalau kita masih tergantung ikan rucah, cukup berbahaya. Harus didorong dari sekarang berinovasi mengembangkan pakan-pakan yang tidak tergantung ikan rucah tangkapan alam. Apakah mengembangkan kekerangan atau keong kalau di darat. Tapi ini harus bisa dibuat skala industri kalau hanya tingkat lokal, nggak efektif," tandasnya.

Poros Maritim

Mengamati visi-misi calon presiden (capres) 2024 tentang pembangunan kelautan dan perikanan, Suhana menyoroti, masih sangat minim. "Yang terjadi di visi-misi ketiga capres, *blue economy* cenderung eksploitatif sehingga yang terjadi *ocean grabbing*, bagaimana berlomba-lomba mengeksploitasi laut. Presiden yang terpilih harus kembali membangkitkan poros maritim karena ke depan ekonomi kelautan mau tidak mau harus jadi tumpuan ekonomi nasional. Tentu harus dikelola secara baik, jangan sampai memindahkan pendekatan eksploitatif di darat dipindahkan ke

laut. Presiden harus bisa mengedepankan pendekatan berkelanjutan di laut," serunya.

Selain itu juga, *IUU-Fishing* tetap menjadi perhatian. Hasil riset Suhana, *IUU-Fishing* banyak dilakukan di daerah perairan 12 mil ke bawah yang menjadi kewenangan pemda. Pencurian ikan antarwilayah, kapal yang tidak berizin, atau penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan masih marak di daerah. Sementara, perhatian pemda terhadap masalah ini sangat minim. Presiden terpilih harus bisa mengkonsolidasikan pemda, termasuk anggarannya untuk mengawasi laut. "Bagaimana pemda dapat ikut serta, minimal memperbaiki anggaran pengawasan. Selama ini pemda sangat minim, mungkin di bawah 1% anggaran untuk itu," timpalnya.

Kemudian, memperhatikan rantai dingin, termasuk sarana dan biaya logistik untuk menjamin stabilitas mutu ikan budidaya dan tangkapan. Menurut Suhana, salah satu hal yang memacu impor bahan baku industri karena ikan hasil tangkapan untuk industri pengalengan itu mutunya jelek. Kalau nelayan dan pembudidaya bisa menjaga mutu dengan baik, industri pasti sangat bergantung dengan pasokan dalam negeri karena lebih bagus daripada impor.

"Hilirisasi sektor perikanan itu bukan mengolah bahan baku jadi produk olahan tapi menyediakan ikan yang tadinya ditangkap, bisa cepat sampai di konsumen dengan kualitas yang bagus. Karena, standar ikan itu pertama ikan hidup, *fresh*, bukan olahan ikan asin. Sehingga, bagaimana ikan *fresh* ini bisa cepat sampai konsumen," cetusnya.

Terlebih, lanjut Wakil Sekretaris Pandu Laut Nusantara tersebut, "Indonesia penduduknya luar biasa, itu pasar yang luar biasa. Selama ini pemerintah baru konsentrasi rantai dingin di pelabuhan. Padahal, yang utama selain pelabuhan itu pasar. Dari pelabuhan ke pasar harus diperhatikan. Jadi, infrastruktur rantai dingin dari hulu ke hilir bisa jadi prioritas."

Biaya logistik antarpulau selama ini juga jadi masalah karena jauh lebih mahal daripada biaya logistik antarnegara. "Makanya kenapa industri ini banyak melakukan impor, biaya logistik impor lebih murah daripada mendatangkan dari dalam negeri. Bagaimana menekan biaya logistik plus infrastruktur rantai dingin. Pemerintah perlu meniru konsepnya es krim, 'kan sama, bisa sampai ke depan rumah, itu rantai dingin juga," pungkasnya.

Windi Listianingsih